

## Korupsi, utang publik, tahun politik, dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang demokratis

Rida Srihadiastuti <sup>a\*</sup>, Mahjus Ekananda <sup>b</sup>

Universitas Indonesia. Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, 16424, Indonesia

<sup>a</sup> [rsrihadiastuti.mbti@gmail.com](mailto:rsrihadiastuti.mbti@gmail.com); <sup>b</sup> [m.ekananda@gmail.com](mailto:m.ekananda@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Studi ini menyelidiki dampak korupsi politik dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di 43 negara berkembang demokratis yang telah mengalami frekuensi siklus pemilihan umum yang bervariasi selama tahun 2002 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan metode PMG-ARDL, serta menggunakan data dari World Bank dan *International Monetary Fund* (IMF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korupsi dapat menghasilkan manfaat 'sesaat', pada akhirnya akan menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Analisis kami juga membandingkan dampak tersebut dengan mengelompokkan negara berdasarkan frekuensi tahun pemilihan umum yang berbeda, yang selanjutnya disebut sebagai 'tahun politik'. Pada kelompok negara dengan frekuensi tahun politik yang 'tinggi', dampak korupsi lebih merugikan dibandingkan pada kelompok negara dengan frekuensi tahun politik yang 'rendah'. Untuk mengantisipasi dampak buruk korupsi dan memastikan alokasi dana pembangunan tepat sasaran, kami merekomendasikan: (1) memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan untuk meminimalisir tindak korupsi; (2) mengukur korupsi dengan indikator baru yang lebih konkret, tidak hanya indeks persepsi; (3) mengubah mekanisme pembayaran pajak, sebagai kontrol masyarakat secara langsung terhadap alokasi anggaran yang kerap kali tidak efisien dan mengalami kebocoran; dan (4) meningkatkan efektivitas mekanisme kampanye untuk mencegah tindak korupsi oleh para calon kandidat pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Dampak Korupsi; Pembangunan Ekonomi; Utang Negara; Tahun Politik; Kontrol Publik

**How to Cite:** Srihadiastuti, R., & Ekananda, M. (2024). Corruption, public debt, political years, and economic growth in democratic developing countries. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 197-210. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1264>



### Pendahuluan

Fenomena korupsi dan tekanan utang publik menjadi batu sandungan dalam pencapaian Agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* di tahun 2030, yang bertujuan membangun kesetaraan hak masyarakat atas pembangunan, kemudahan bisnis dan kesempatan kerja, mendorong pemerintahan/institusi yang transparan dan akuntabel, serta menegakkan supremasi hukum (UNDESA, 2023). Pada negara-negara berkembang, prevalensi korupsi lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju (Beyaert dkk., 2023; Ibrahim, 2021; Yanto dan Adrison, 2020). Menurut World Bank, negara-negara berkembang ini pada umumnya kesulitan dalam mengendalikan korupsi dan sering mengalami defisit anggaran, sehingga menyebabkan mereka berutang dari domestik maupun dari luar negeri (Musa dkk., 2023). Keterbatasan tabungan, investasi, dan pendapatan dari pajak, menyebabkan negara-negara berkembang bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran (Rahman dkk, 2019; Yusuf dan Mohd, 2021). Korupsi dinilai dapat mempercepat atau memperlambat roda birokrasi yang kaku di negara-negara berkembang pada tahap awal pembangunan. Ilmuwan politik Samuel P. Huntington menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai 'pelumas' bagi roda birokrasi yang lamban dan kaku di negara-negara dengan institusi yang lemah, memungkinkan proses administratif berjalan lebih lancar meskipun secara ilegal. Huntington melihat korupsi sebagai fenomena yang sering terjadi selama periode transisi dari tradisional ke modern. Berseberangan dengan hal tersebut, ekonom Paulo Mauro berpendapat bahwa korupsi memperlambat roda birokrasi, menghambat investasi dan menurunkan produktivitas. Kemudian, mendukung pandangan Mauro, pada tahun 1999 Hall dan Jones berargumen bahwa korupsi menunjukkan kualitas institusi/kelembagaan yang rendah/buruk, dan mereka menggunakan model pertumbuhan Solow untuk melihat dampaknya

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, kualitas institusi yang kuat semestinya menjadi faktor penting yang menumbuhkan produktivitas faktor total, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Para peneliti telah menyelidiki bagaimana korupsi memengaruhi perekonomian dari berbagai perspektif. Mayoritas peneliti terdahulu mendukung terdapat dampak negatif signifikan korupsi terhadap pembangunan ekonomi (Al Qudah dkk., 2020; Alfada, 2019; Olamide dan Maredza, 2023) baik dalam jangka pendek (Olamide dan Maredza, 2023) maupun jangka panjang (Antoni dkk., 2019; Gründler dan Potrafke, 2019; Ibrahim, 2021; Khan dkk., 2020), baik secara langsung (Al Qudah dkk., 2020) maupun tidak langsung (Antoni dkk., 2019). Di sisi lain, ditemukan pula bukti pengaruh positif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi (Huang, 2016; Khan dkk., 2020; Trabelsi dan Trabelsi, 2021).

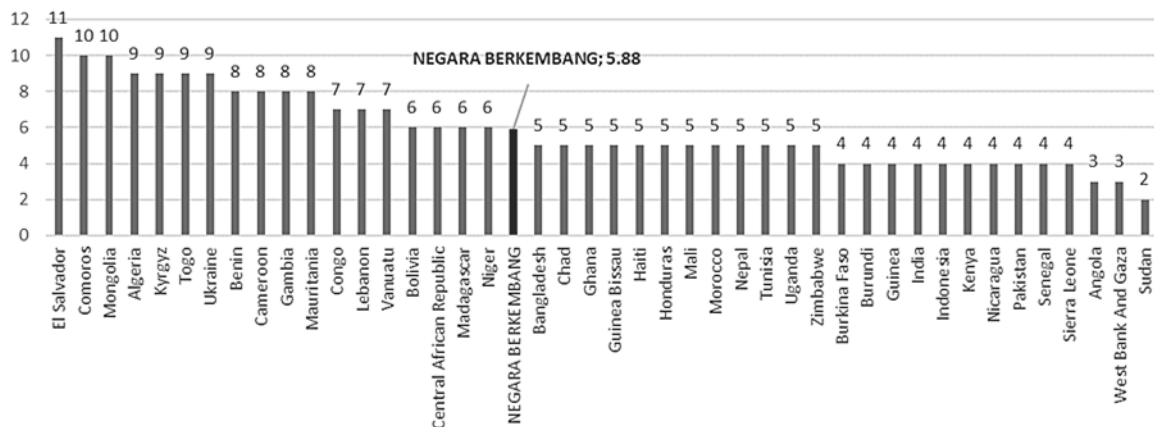
Tahun 2024 adalah 'tahun politik' bagi 49% (hampir separuh) populasi di dunia, sebanyak 64 negara menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secara nasional (Time Magazine, 2024) 30 di antaranya adalah negara berkembang yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara dan badan legislatif. Namun, isu peningkatan korupsi saat masa kampanye dan tahun pemilu tidak akan terelakkan, studi empiris pun mendukung hal ini. Penelitian di Rusia selama periode 1999–2004 menunjukkan bahwa politisi lebih korup sebelum pemilu untuk meningkatkan kontribusi kampanye; perusahaan menyuap politisi untuk memenangkan kontrak pengadaan barang dan jasa (Mironov dan Zhuravskaya, 2016). Penelitian di 100 negara demokrasi menunjukkan hasil bahwa politisi yang merupakan petahana memanipulasi indikator makroekonomi dalam upaya untuk dipilih kembali, mereka terbukti meningkatkan pengeluaran saat ini dengan mengorbankan investasi publik, meningkatkan pengeluaran kesehatan masyarakat dan sosial, dan meningkatkan PDB jangka pendek sebelum pemilu (Potrafke, 2019). Selain itu, pejabat publik dan politisi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dengan menerapkan atau tidak menerapkan kebijakan strategis tertentu menjelang pemilu (Finan dan Mazzocco, 2021), sementara petahana mendistribusikan subsidi uang, sumber daya, dan bantuan kepada pemilih sebagai imbalan atas suara (Mironov dan Zhuravskaya, 2016). Politisi (petahana) melakukan jual-beli suara 'klientelisme' atau 'politik klien', yaitu pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan dukungan politik dengan konstituen (Fazekas dan Hellmann, 2023). Penelitian di Indonesia, korupsi politik muncul dalam berbagai bentuk, seperti nepotisme, politik gentong babi, hingga manipulasi data pemungutan suara (Umam, 2024).

Setiap isu telah dianalisis secara empiris, namun masih terbatas penelitian yang menyelidiki pengaruh korupsi politik dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara berkembang demokratis yang sedang mengalami tahun-tahun politik (yaitu, tahun-tahun pemilihan). Melihat kekosongan literatur, penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi khusus di negara berkembang yang menjalankan sistem demokrasi. Sebagai kontribusi, kami menyelidiki perbedaan pengaruh keduanya bergantung pada frekuensi tahun politik yang dialami dua subkelompok negara berkembang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teknik kointegrasi dengan pendekatan Model Autoregresif Distribusi Lag Kelompok Rata-Rata Terkelompok yang dikenal dengan istilah PMG ARDL yang akan menangkap keseimbangan jangka panjang antar variabel, serta penyesuaiannya dari fluktuasi jangka pendek, yang bersifat dinamis bukan permanen. Ruang lingkup penelitian adalah 43 negara berkembang demokratis, yang dibagi menjadi 2 kelompok: 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu 'tinggi', dan 25 negara dengan frekuensi tahun pemilu 'rendah'. Periode pengamatan selama 20 tahun mulai dari tahun 2002 hingga tahun 2021. Dengan mengetahui pengaruh korupsi dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang demokratis dalam jangka panjang, diharapkan dapat berimplikasi pada rancangan kebijakan pemerintah negara-negara berkembang yang lebih baik, dalam menghadapi fenomena korupsi dan tekanan utang publik sebagai ancaman pencapaian Agenda 2030 SDGs.

## Metode

Metode kuantitatif PMG-ARDL digunakan dalam penelitian ini. Data berupa panel (lintas negara dan tahun) dari 43 negara berkembang yang bersumber dari World Bank dan IMF, dengan periode pengamatan 20 tahun (2002-2021). Empat puluh tiga negara sampel kami kelompokkan menjadi 2 sub-sampel (Lihat Gambar 1). Sub sampel pertama adalah 18 negara 'High' (frekuensi tahun pemilu tinggi) sebagaimana sayap kiri dari rata-rata negara berkembang, dan sub sampel ke-2 adalah 25 negara 'Low' (frekuensi tahun pemilu rendah) sebagaimana sayap kanan dari rata-rata.



**Gambar 1.** Jumlah Tahun Pemilu di 43 Negara Berkembang (2002-2021)  
(sumber: diolah dari data berbagai sumber)

Dalam perhitungan sebenarnya, tahun politik terdiri dari tahun pemilu ditambah masa kampanye. Hal ini dikarenakan korupsi terindikasi meningkat pada 'siklus pemilu' yang tidak hanya saat tahun pemilu, namun juga saat tahun menjelang pemilu, yaitu masa kampanye (Amick dkk., 2022; Mironov & Zhuravskaya, 2016; Potrafke, 2019). Sehingga, selama masa pengamatan tahun 2002-2021, dari sebanyak 43 negara, total tahun pemilu ditambah masa kampanye terjadi sebanyak 253 kali (tahun). Maka, rata-rata 43 negara berkembang mengalami siklus pemilu adalah sebanyak 5,88 tahun (253 dibagi 43). Rata-rata ini digunakan sebagai *cut-off* pembagian sampel menjadi dua sub-sampel, yaitu: (a) 18 negara 'High' (frekuensi tahun pemilu tinggi, di atas rata-rata negara berkembang,  $\geq 6$  tahun); dan (b) 25 negara 'Low' (frekuensi tahun pemilu rendah, di bawah rata-rata negara berkembang,  $< 6$  tahun). Teknik pengelompokan sampel negara semacam ini sudah pernah diaplikasikan pada penelitian Erum & Hussain (2019), dalam konteks dan lingkup penelitian yang berbeda.

Kemudian penelitian ini menggunakan PDB per kapita sebagai variabel dependen/terikat, 2 variabel yang menjadi fokus penelitian: tingkat korupsi (indeks korupsi) dan utang publik, serta 4 variabel kontrol yang merupakan faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi: pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan penduduk dan keterbukaan perdagangan. Data untuk variabel kontrol bersumber dari Bank Dunia.

PDB per kapita (data konstan \$AS 2015) bersumber dari World Development Indicators (WDI) World Bank, variabel ini kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural (LGDPC). Dalam penelitian ini Indeks Korupsi (CORR) diolah dari data *Control of Corruption Index* World Bank yaitu skor pengendalian korupsi suatu negara/pemerintahan (-2.5 sangat korup, sampai dengan +2.5 tidak korup) yang kemudian dikonversi menjadi skor 0 (korupsi rendah) sampai dengan 100 (korupsi tinggi). IMF mendefinisikan utang publik sebagai utang negara atau utang pemerintah. Kami menggunakan persentase utang terhadap PDB (DEBT), berupa Utang Pemerintah Pusat sebagai indikatornya, bersumber dari IMF. Pengeluaran Pemerintah (GEXP) adalah pengeluaran konsumsi akhir umum pemerintah sebagai persentase terhadap PDB. Investasi (INVT) menggunakan data Pembentukan Modal Tetap Bruto sebagai persentase terhadap PDB. Pertumbuhan Penduduk (POPG) adalah laju pertumbuhan penduduk tahunan yang dinyatakan dalam persentase. Keterbukaan Perdagangan (TOP) adalah total ekspor dan impor sebagai persentase terhadap PDB. Semua variabel kontrol ini bersumber dari World Bank.

Untuk memperjelas definisi korupsi politik pada penelitian ini, digunakan pengertian korupsi yang lebih menekankan kepada ‘penyalahgunaan jabatan publik yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara, untuk keuntungan pribadi’ (IMF, 2018; Kaufmann dkk., 2011) sebagai cerminan dari pelanggaran yang terjadi dalam institusi suatu negara. Korupsi politik dapat terwujud dalam berbagai cara melalui keterlibatan pejabat publik, politisi, atau badan pemerintah, seperti: (1) Pejabat publik atau politisi yang mendapat balas jasa atas pemberian pekerjaan atau kontrak pengadaan pemerintah kepada swasta, sponsor, teman, atau keluarga mereka (TI, 2020) menjelang pemilu (Mironov dan Zhuravskaya, 2016). Menurut Yanto dan Adrison (2020) pengadaan barang-jasa publik merupakan bidang utama korupsi di pemerintahan; (2) Pegawai negeri yang meminta uang atau imbalan (gratifikasi) tidak semestinya sebagai pertukaran atas layanan (Andvig dkk., 2001; TI, 2020); (3) Pejabat memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dengan perusahaan atau kelompok kepentingan yang memberi suap (*bribery*) (TI, 2020); (4) Pejabat publik melakukan penggelapan (*embezzlement*), pencurian sumber daya/dana publik pada lembaga tempatnya bekerja, meskipun tidak ada properti individu yang dicuri, sehingga warga negara tidak dianggap sebagai korban dengan hak hukum (Andvig dkk., 2001); (5) Lembaga/perwakilan negara melakukan penipuan (*fraud*), terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal, pemalsuan, dan pemerasan. Kejahatan ini mencakup situasi di mana para menteri dan birokrat tinggi tidak hanya menyembunyikan tindakan tersebut, tetapi juga secara aktif terlibat di dalamnya (Andvig dkk., 2001); (6) Petugas bea cukai manipulasi dokumen masuk para pengusaha lokal dan internasional, baik dari segi jumlah maupun harga barang impor, untuk penghindaran tarif/pajak. Hal ini termasuk ke dalam kasus penyelundupan/perdagangan ilegal (Ekananda, 2018); (7) Pejabat publik/politisi memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dengan menerapkan atau tidak menerapkan kebijakan tertentu menjelang pemilu (Finan dan Mazzocco, 2021); (8) Petahana menjalankan kampanye pemilu dan mendistribusikan subsidi uang, barang, dan jasa kepada pemilih selama kampanye (Mironov dan Zhuravskaya, 2016); (9) Politisi (petahana) melakukan jual-beli suara ‘klientelisme’ atau ‘politik klien’, yaitu pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan dukungan politik dengan konstituen (Fazekas dan Hellmann, 2023); dan (10) Korupsi dalam dunia politik beragam bentuk lainnya, semisal tudingan nepotisme, politik genting babi, hingga politisasi instrumen kekuasaan negara dan kecurangan pemilu (Umam, 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses jangka panjang, namun fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek pasti terjadi di dalamnya. Maka, kami menggunakan pendekatan ‘kointegrasi’ yang dapat memotret dinamisasi antar variabel. Sehingga, metode yang cocok digunakan adalah metode PMG-ARDL yang dikembangkan oleh Pesaran. Model ini merupakan metode estimasi yang konsisten dan efisien karena metode ini mencakup *lag* (jeda tahun/waktu) pada variabel dependen dan independen sehingga akan menghilangkan masalah endogenitas, yaitu korelasi antara variabel independen dan residual dalam model. Sebelum menggunakan PMG-ARDL, perlu dilakukan dua pra-uji seperti pada penelitian Sinaga dkk. (2023), yaitu: (1) Uji stasioneritas data, dengan uji akar unit panel IPS dan ADF-Fisher; dan (2) Uji ketergantungan *cross-sectional*. Adanya ketergantungan *cross-section* antar deret akan memberikan hasil empiris yang bias dan tidak konsisten. Penelitian ini memerlukan kajian ketergantungan lintas sektor karena negara-negara berkembang terhubung melalui perdagangan, globalisasi, dan jaringan lainnya serta menghasilkan efek limpahan.

Setelah kedua pra-uji tersebut terpenuhi, estimasi PMG-ARDL dapat dilakukan. Kemudian tahapan terakhir adalah memvalidasi hasil PMG-ARDL dengan uji beda koefisien regresi (Uji Chow), untuk membuktikan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada kedua subsampel, mengikuti teknik Binkley dkk. (2020). Model empiris dalam bentuk umum/implisitnya:

$$GDPC_{it} = f(CORR, DEBT, macroeconomic\ variables)_{it} \dots\dots\dots 1]$$

Analisis model dengan menggunakan *software* ekonometrika Eviews 10.0. Model ekonometrik yang diusulkan secara eksplisit adalah sebagai berikut:

$$\ln GDPC_{it} = \beta_0 + \beta_1 CORR_{it} + \beta_2 DEBT_{it} + \beta_3 GEXP_{it} + \beta_4 INVT_{it} + \beta_5 POPG_{it} + \beta_6 TOP_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots 2]$$

Kemudian, arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen didasarkan pada teori. Dengan menghitung turunan korupsi terhadap PDB per kapita, maka dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan negatif, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ln GDP_{it}}{\partial CORR_{it}} = \beta_1 < 0 \dots\dots\dots 3]$$

Dengan menghitung turunan utang publik terhadap PDB per kapita, maka dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan negatif, dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{\partial \ln GDP_{it}}{\partial DEBT_{it}} = \beta_2 < 0 \dots\dots\dots 4]$$

Serta untuk membuktikan faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi: GEXP, INVT, POPG, dan TOP diharapkan positif, yaitu  $\beta_3, \beta_4, \beta_5$  dan  $\beta_6 > 0$ .

Model empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta LGDPC_{it} = \phi_i EC_{it} + \sum_{j=1}^{p-1} \lambda_{1j} \Delta LGDPC_{t-j} + \sum_{j=1}^{q-1} \theta \Delta X'_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots 5]$$

Dimana  $\Delta X$  adalah vektor variabel penjelas:

$$\Delta X = \begin{bmatrix} \Delta CORR \\ \Delta DEBT \\ \Delta GEXP \\ \Delta INVT \\ \Delta POPG \\ \Delta TOP \end{bmatrix} \dots\dots\dots 6]$$

Simbol  $\Delta$  menunjukkan operator orde pertama,  $i$  adalah negara (*cross-section*) dan  $t$  adalah dimensi waktu,  $j$  adalah lag waktu.  $LGDPC$  adalah logaritma natural PDB per kapita sebagai variabel dependen/terikat;  $CORR$  dan  $DEBT$  sebagai variabel independen/bebas yang menjadi variabel *interest*;  $GEXP, INVT, POPG,$  dan  $TOP$  sebagai variabel kontrol.  $EC_{it}$  adalah *error correction term (ECT)*, berkaitan dengan koefisien  $\phi_i$  yang menunjukkan hubungan jangka panjang (mengukur kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan). Dimana koefisien  $\phi_i$  harus negatif dan signifikan dengan statistik di bawah kisaran antara 0 dan -1. Karena persamaan di atas merupakan persamaan tunggal, endogenitas tidak menjadi masalah karena bebas dari korelasi residual.

**Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

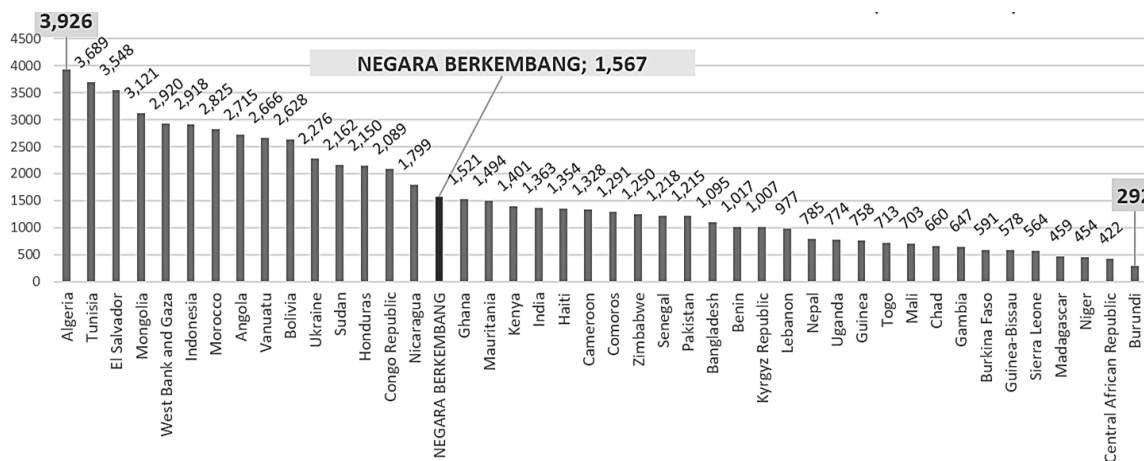
Di 43 negara berkembang yang menjadi objek penelitian, rata-rata *PDB per kapita* dari tahun 2002-2021 adalah sebesar \$AS 1.566,52, dalam bentuk logaritmanya sebesar 7,18. *Indeks korupsi* memiliki rata-rata sebesar 65,61 poin menunjukkan tingkat korupsi di negara berkembang tinggi (dari skala 0-100). *Persentase utang publik* memiliki rata-rata sebesar 51,74%. *Persentase pengeluaran pemerintah* terhadap PDB memiliki rata-rata sebesar 13,38%. *Persentase investasi* terhadap PDB di negara berkembang memiliki rata-rata sebesar 22,05%. *Laju pertumbuhan penduduk tahunan* memiliki rata-rata sebesar 2,14%. *Keterbukaan perdagangan* yang berupa persentase jumlah ekspor dan impor terhadap PDB memiliki rata-rata sebesar 65,03%. Nilai standar deviasi (simpangan baku) keseluruhan variabel menunjukkan nilai lebih kecil dari rata-ratanya, maka data cenderung bersifat homogen/serupa atau memiliki tingkat penyimpangan dari rata-rata yang tidak terlalu besar. Lihat Tabel 1.

Dari keseluruhan sampel, Algeria yang merupakan negara berpendapatan menengah ke bawah, menempati urutan teratas rata-rata PDB per kapita, yaitu sebesar \$AS 3.926. Sedangkan Burundi yang termasuk negara berpendapatan rendah, menempati urutan terbawah dengan PDB per kapita sebesar \$AS 292, juga merupakan negara termiskin di dunia saat ini. Sebanyak 15 negara memiliki rata-rata PDB per kapita di atas rata-rata keseluruhan sampel, dan sebanyak 28 negara di bawah rata-rata tersebut. Lihat Gambar 2.

Tabel 1. Statistik Variabel 43 Negara Berkembang (2002-2021)

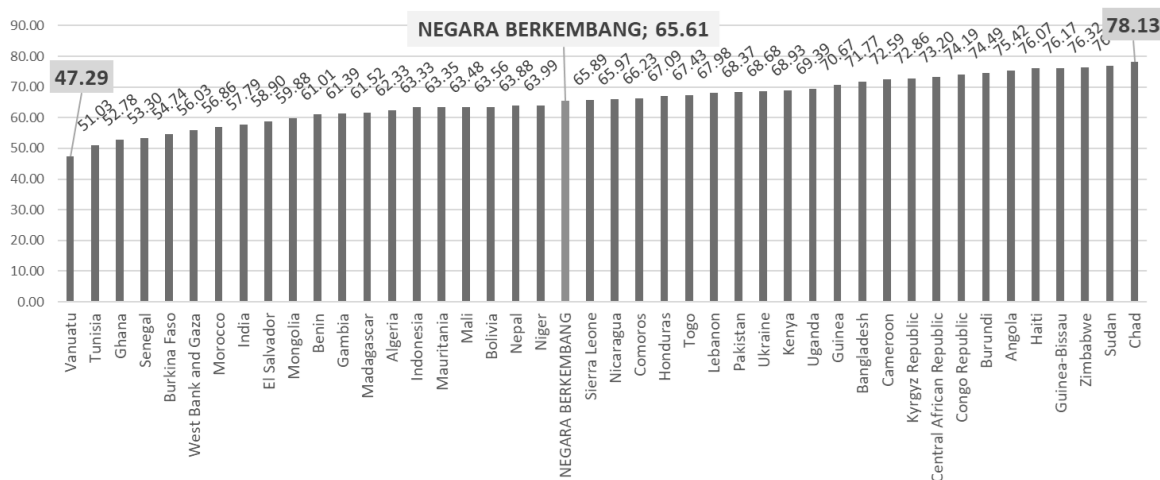
Variabel	Rata-rata	St. Dev.	Nilai Maks.	Nilai Min.	Observasi
PDB per kapita (\$AS)	1566,516	1024,341	4385,112	263,3610	860
Ln PDB per Kapita	7,184510	0,731773	9,109100	5,573500	860
Indeks Korupsi	65,61043	8,357125	81,94230	40,47180	860
Utang Publik	51,73630	33,44000	275,0356	7,093500	860
Pengeluaran Pemerintah	13,38285	4,718655	31,34430	2,047100	860
Investasi	22,04898	8,466928	78,00090	2,000400	860
Pertumbuhan Penduduk	2,136391	1,087537	9,971970	-2,87987	860
Keterbukaan Perdagangan	65,02620	27,19934	156,8618	4,127500	860

(Sumber: olahan penulis dengan Eviews 10.0)



Gambar 2. Rata-rata PDB per kapita di 43 Negara Berkembang (2002-2021) (sumber: WDI, World Bank)

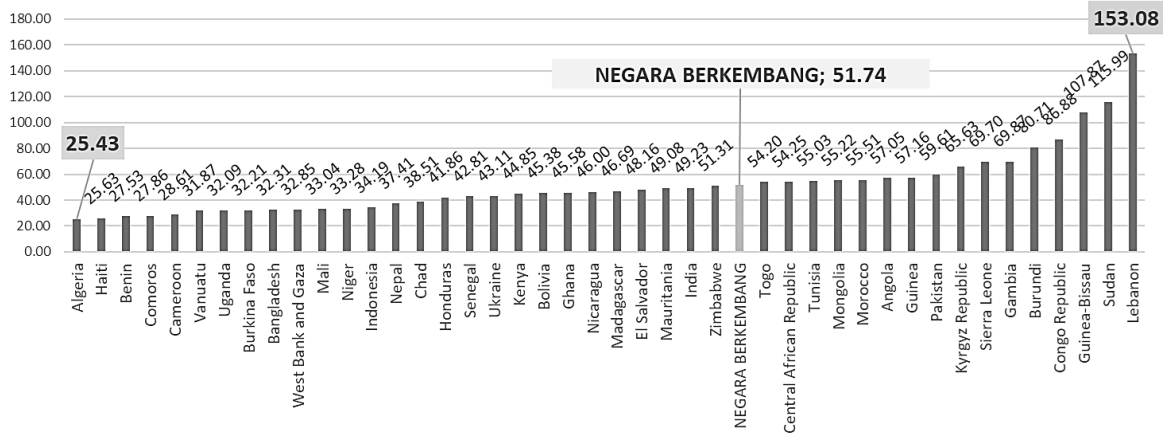
Dari keseluruhan sampel, Chad dengan PDB per kapita sebesar \$AS 660 (berpendapatan rendah) merupakan negara terkorup, rata-rata tingkat indeks korupsi sebesar 78,13 poin. Kemudian disusul 22 negara lainnya yang memiliki rata-rata tingkat korupsi di atas rata-rata keseluruhan sampel. Sedangkan 20 negara sisanya memiliki rata-rata tingkat korupsi lebih rendah dari rata-rata keseluruhan. Vanuatu dengan PDB per kapita sebesar \$AS 2.666 (berpendapatan menengah ke bawah) menempati posisi negara paling tidak korup dalam penelitian ini, dengan rata-rata indeks korupsi sebesar 47,29 poin. Lihat Gambar 3.



Gambar 3. Rata-rata Tingkat Korupsi di 43 Negara Berkembang (2002-2021) (Sumber: WGI, World Bank)

Dari keseluruhan sampel, Lebanon dengan PDB per kapita sebesar \$AS 977 (berpendapatan rendah) merupakan negara dengan rata-rata persentase utang publik terbesar, yaitu 153% dari PDB. Bahkan, Lebanon ini menempati posisi ke-2 dengan rasio utang tertinggi di seluruh dunia di

bawah Jepang (posisi ke-1) yang mencapai 167,21% pada November 2021. Sebanyak 16 negara memiliki rata-rata persentase utang publik di atas rata-rata keseluruhan. Sedangkan 27 negara sisanya memiliki rata-rata persentase utang publik di bawah rata-rata keseluruhan. Algeria dengan rata-rata PDB per kapita terbesar pada penelitian ini menempati posisi negara paling sedikit berutang, hanya sebesar 25,43% dari PDB. (Gambar 4).



**Gambar 4.** Rata-rata Persentase Utang Publik di 43 Negara Berkembang (2002-2021)  
(Sumber: IMF WEO)

Sebelum menggunakan metode PMG-ARDL, kita perlu mencegah masuknya variabel stasioner I (2) ke dalam regresi dengan Uji Akar Unit Panel, hasilnya adalah semua variabel diterima karena masih stasioner pada orde satu dan orde nol.

**Tabel 2.** Hasil Uji Stasionaritas Akar Unit Panel

Variabel	IPS		ADF Fisher	
	Level	Orde Pertama	Level	Orde Pertama
LGDP	0,83441	-6,97349***	91,7953	197,204***
CORR	-1,73298**	-12,1420***	118,436**	311,858***
DEBT	-0,64121	-6,04353***	113,372**	179,273***
GEXP	-0,68485	-12,0716***	102,365	309,927***
INVT	-2,18356**	-12,0081***	130,457***	306,281***
POPG	0,71207	-7,34596***	101,574	225,623***
TOP	-2,68381***	-12,8286***	118,794**	326,435***

Catatan: Variabel eksogen: Efek individual-non tren; Lag yang ditentukan pengguna: 1; Signifikansi koefisien: tanda \*\*\*, \*\* dan \* menunjukkan 1%, 5% dan 10%. Sumber: diolah oleh Eviews 10.0

Kemudian dari Tabel 3 diketahui bahwa hasil uji korelasi dengan uji residual ketergantungan *cross-sectional* menunjukkan adanya ketergantungan lintas sektoral antara 43 negara berkembang, karena nilai probabilitas dari uji statistik menolak hipotesis nol independensi *cross-sectional* dengan signifikansi di bawah 1%.

**Tabel 3.** Uji Ketergantungan Cross-Section

Uji	Statistik	d.f.	Prob.
Breusch & Pagan LM	4125,409	903	0,0000

H0: *Cross section independence* (tidak ada korelasi antar negara); HA: *Cross section dependence* (ada korelasi antar negara)

Metode kointegrasi PMG ARDL kemudian digunakan untuk melihat penyesuaian jangka pendek ke kesimbangan jangka panjang. Tabel 4 merupakan hasil estimasi.

Uji beda koefisien regresi (Uji Chow) diperlukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan pengaruh korupsi dan utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi antara kedua kelompok negara berdasarkan frekuensi tahun pemilu ‘tinggi’ dan ‘rendah’. Dengan membandingkan hasil statistik uji F dengan F tabel, di mana statistik uji F harus lebih besar dari nilai F tabel, didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.

**Tabel 4.** Hasil Estimasi PMG-ARDL

Dependen: LGDPC (1)	43 Negara (2)	18 Negara ( <i>High</i> ) (3)	25 Negara ( <i>Low</i> ) (4)
Persamaan Jangka Panjang			
CORR	-0,016478*** (0.005693)	-0,017830*** (0.005405)	-0,011284** (0.005302)
DEBT	0,010983*** (0.001960)	-0,000375 (0.001226)	0,009125*** (0.001883)
GEXP	0,070489*** (0.012700)	0,095167*** (0.010895)	0,054101*** (0.010461)
INVT	0,066535*** (0.008881)	0,056443*** (0.012197)	0,056085*** (0.008435)
POPG	0,655485*** (0.127924)	-0,271252*** (0.086895)	0,583586*** (0.152584)
TOP	0,003191 (0.001966)	0,005073* (0.002580)	0,004637** (0.001924)
Persamaan Jangka Pendek			
ECT <sub>(-1)</sub>	-0,013408* (0.007404)	-0,042229*** (0.015073)	-0,021873* (0.012624)
ΔCORR	0,001098* (0.000611)	0,001300 (0.001083)	0,000774 (0.000653)
ΔDEBT	-0,001934*** (0.000393)	-0,001169*** (0.000281)	-0,002483*** (0.000601)
ΔGEXP	-0,003566* (0.001870)	-0,007235** (0.003295)	-0,004279* (0.002586)
ΔINVT	0,003089*** (0.000946)	0,003300*** (0.001078)	0,001906 (0.001172)
ΔPOPG	0,020081 (0.032245)	-0,010338 (0.035442)	0,046296 (0.050946)
ΔTOP	6,71E-05 (0.000490)	-0,000956 (0.001172)	0,000694** (0.000331)
C	0,063358** (0.030355)	0,278273*** (0.097412)	0,101878* (0.052265)

Catatan: Standar error dalam tanda kurung. Signifikansi koefisien: tanda \*\*\*, \*\* dan \* menunjukkan 1%, 5% dan 10%. Model ARDL dipilih berdasarkan AIC, Model 43 Negara: 1,1,1,1,1,1; Model 18 Negara High: 1,1,1,1,1,1; Model 25 Negara Low: 1,1,1,1,1,1; Observasi: 817 (43 Negara); 342 (18 Negara); 475 (25 Negara).

**Tabel 5.** Nilai *Sum Square* Residual pada Sampel dan Sub-sampel

	43 Negara	18 Negara ( <i>High</i> )	25 Negara ( <i>Low</i> )
<i>Sum squared resid (SSR)</i>	0,526160	0,254528	0,243024

Statistik uji F (F hitung) menunjukkan hasil sebesar 6,795, sementara nilai F tabel untuk persyaratan ditolaknya  $H_0$  adalah sebesar 2,020. Maka F hitung > F tabel, dan  $H_0$  ditolak. Maka perbedaan pengaruh korupsi dan utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi antara kelompok negara dengan frekuensi tahun pemilu 'tinggi' dan 'rendah' dapat dinyatakan signifikan. Hasil validasi perbedaan pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa frekuensi tahun pemilu dapat memengaruhi penguatan atau pelemahan pengaruh korupsi dan utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

## Pembahasan

Dari hasil estimasi PMG-ARDL menunjukkan bahwa korupsi sebagai bentuk buruk kualitas institusi berpengaruh merugikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, pada sampel dan kedua sub-sampel. Meskipun demikian, korupsi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sesaat. Dampak positif ditemui dalam jangka pendek, namun signifikan hanya pada sampel 43 negara berkembang. Temuan pengaruh positif dalam jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak sementara ini memang lah tidak dapat sesuai dengan dampak jangka panjangnya.

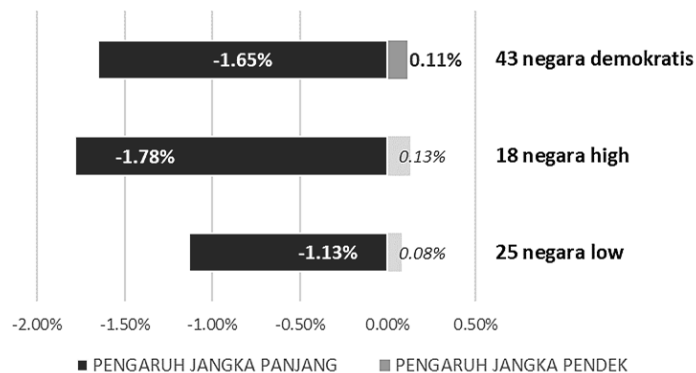
Sebagaimana dikuatkan oleh penelitian sebelumnya, korupsi merugikan pertumbuhan ekonomi, karena menurunkan produktivitas faktor total sesuai teori Solow. Dalam jangka panjang hal ini terbukti. Dalam jangka panjang, setiap peningkatan 1 poin tingkat korupsi akan menurunkan PDB per kapita sebesar: -1,65% pada 43 negara berkembang; -1,78% pada 18 negara yang mengalami frekuensi tahun politik tinggi; dan -1,13% pada negara dengan frekuensi tahun politik yang rendah. Dengan indikasi bahwa korupsi lebih merebak saat masa-masa tahun politik (Mironov dan Zhuravskaya, 2016), yaitu masa-masa menjelang dan saat tahun pemilu, maka kemungkinan dampaknya memang akan lebih kuat pada sub-sampel 18 negara dengan frekuensi tahun pemilu 'tinggi'.

Pada umumnya, negara berkembang masih dalam tahap transisi pembangunan pasca-terjajah dari negara maju (Huntington dan Fukuyama, 1968), sehingga sistem birokasinya masih dalam proses transformasi dan belum sebaik negara maju. Termasuk dalam konteks ini yaitu birokrasi saat pemilu. Negara berkembang belum dapat memfasilitasi seutuhnya kebutuhan para kandidat



(calon kepala negara atau parlemen) untuk mempromosikan diri kepada para konstituen – masyarakat pemilih. Sehingga para calon akan mencari pendanaan untuk kampanye ‘dari pihak lain’, atau pihak swasta (kelompok kepentingan) yang melihat celah untuk memuluskan bisnis mereka akan melobi para politisi (kandidat) yang berkepentingan (Finan dan Mazzocco, 2021) dengan begitu korupsi akan lebih merebak saat ‘tahun politik’.

Kemudian, analisis dalam jangka pendek, yang sifatnya belum permanen karena masih dalam tahap penyesuaian ke keseimbangan jangka panjang – pengaruh korupsi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.11% setiap kenaikannya 1 poin di keseluruhan 43 negara berkembang. Temuan ini selaras dengan temuan Gründler & Potrafke (2019), politisi terbukti meningkatkan pengeluaran sebelum pemilu dan meningkatkan pertumbuhan PDB jangka pendek sebelum pemilu dengan motif politis untuk terpilih. Dalam hal ini, bentuk korupsi adalah bagaimana pemerintah yang merupakan petahana memanipulasi citra kinerja ekonomi ‘sesaat’ agar terpilih kembali. Bagaimanapun, dengan didasari ‘motif politik’, meskipun berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek, jebakan dari korupsi ini perlu diwaspadai, karena akan terasa pada dampak negatifnya dalam jangka panjang, seperti yang sudah kami bahas sebelumnya.



**Gambar 5.** Perbandingan Hasil Estimasi Pengaruh Korupsi

Ajang pemilu merupakan jalan bagi suatu negara berkembang yang menyatakan dirinya demokratis, yaitu ‘mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat’ untuk dapat mengubah nasib negaranya menjadi lebih maju dengan memperbaiki kualitas institusinya – sesuai sasaran Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan yang menjamin terwujudnya masyarakat inklusif akan hak atas pembangunan. Namun, siklus pemilu dapat juga menjadi bumerang ketika para pejabat negara yang merupakan petahana, atau para politisi bermaksud memanipulasi keadaan ekonomi dalam jangka pendek (dengan perilaku-perilaku/transaksi-transaksi di bawah tangan) hingga akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara berkembang memang dalam tahap transformasi birokrasi pasca kemerdekaan, masih dalam keadaan politik yang tidak stabil dan kesulitan dana di semua sektor, sehingga fenomena korupsi ini sulit untuk dapat dihindarkan atau diperparah dengan adanya ajang pemilihan umum.

Negara-negara ini menghadapi kendala besar karena dana pembangunan yang tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada utang publik untuk mengatasi kekurangan anggaran. Oleh karena itu, penyertaan utang publik sangat penting dalam strategi pertumbuhan mereka, karena negara berkembang akan kesulitan untuk meningkatkan pajak di tengah masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah bahkan berpendapatan rendah bisa dikatakan tergolong miskin. Negara berkembang juga tidak bisa mengurangi pengeluaran untuk pembangunannya karena tentunya pada awal tahap masa pembangunan akan membutuhkan dana yang sangat besar. Maka kebijakan pemerintah mengambil utang publik baik dari sumber internal dan eksternal akan sangat diharapkan berdampak baik bagi pembangunan.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa utang publik sebagai persentase dari PDB, dalam jangka panjang memberikan dampak positif bagi pembangunan di 43 negara berkembang dan sub-sampel 25 negara, masing-masing sebesar 1,10% dan 0,92%. Dalam jangka pendek, pada sampel 43 negara berkembang, utang publik berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,19%. Di mana setiap peningkatan 1% utang publik yang

diambil oleh suatu negara berkembang akan menurunkan PDB per kapita sebesar -0,19% dalam jangka pendek. Meski hasil ini tidak permanen karena masih dalam penyesuaian ke dalam keseimbangan jangka panjang, namun dampak negatif ini pun tetap harus diwaspadai oleh negara-negara berkembang.

Negara-negara ini perlu mengakui manfaat jangka panjang dari utang publik, karena dengan demikian keputusan/kebijakan negara berkembang mengambil utang publik adalah tepat. Negara berkembang memang membutuhkan utang publik untuk pembangunannya, meski terdapat ancaman serius jika negara berkembang tidak bisa mengelolanya dengan baik yang akan berakibat pada ketidakmampuan untuk membayar utang publik di kemudian hari. Terlebih dengan ancaman kebocoran anggaran karena praktik korupsi, pengelolaan utang publik di negara-negara berkembang ini haruslah sangat ketat, agar memberikan hasil yang optimal pada pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya mencapai tujuan membebaskan diri dari jebakan negara berpendapatan rendah atau berpendapatan menengah ke bawah, untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sebagai indikator menjadi negara maju. Variabel kontrol yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya investasi dan pengeluaran pemerintah sebagai faktor krusial bagi pertumbuhan berkelanjutan. Peningkatan populasi dapat membawa keuntungan dan kerugian. Sebaliknya, peningkatan perdagangan dapat menghasilkan pengaruh positif yang sedikit atau hampir tidak terlihat dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penting bagi strategi pemerintah untuk fokus pada peningkatan belanja publik dan mempromosikan kebijakan yang ramah investasi. Terlebih dalam jangka pendek, investasi merupakan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor utama, terutama di negara-negara berkembang, sangat bergantung pada pendanaan, terutama dari investasi asing langsung (UN, 2018). Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, meski demikian dampak ini tidak akan menjadi permanen pada dampak jangka panjangnya yang akan positif.

Selain itu, dari ketiga hasil estimasi PMG-ARDL menunjukkan bahwa model ini mengalami penyesuaian ketidakseimbangan jangka pendek ke keseimbangan jangka panjang di seluruh rangkaian variabel – terjadi 'kointegrasi' secepat nilai ECT yang juga disebut *speed of adjustment*. Kecepatan penyesuaian (*speed of adjustment*) pada ketiga hasil estimasi masing-masing secara berurutan adalah 1,34%, 4,22% dan 2,19% per tahunnya, di mana penyesuaian tercepat adalah pada sub-sampel 18 negara berkembang yang mengalami frekuensi tahun politik tinggi yaitu sebesar 4,22%. Menunjukkan bahwa ketika terjadi guncangan pada pertumbuhan ekonomi, dalam jangka pendek, perubahan tingkat korupsi, utang publik, pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan populasi penduduk dan keterbukaan perdagangan telah berkontribusi dalam mengoreksi penyimpangan hasil setiap tahun masing-masing 1,34%, 4,22%, dan 2,19% untuk menjadi seimbang kembali. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian terhadap ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang demokratis dalam periode 2002-2021 relatif 'lambat', meningkat *range* nilai ECT berkisar dari 0 hingga -1 (0% hingga 100%).

### Simpulan

Temuan mengenai hubungan negatif korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang menegaskan bahwa dampak korupsi menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara berkembang demokratis, yang mengalami 'tahun-tahun politik'. Temuan ini menambah rentetan penelitian empiris yang menyatakan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi (Al Qudah dkk., 2020; Alfada, 2019; Antoni dkk., 2019; Erum dan Hussain, 2019; Gründler dan Potrafke, 2019; Ibrahim, 2021; Olamide dan Maredza, 2023) khususnya dalam kaitan gejala korupsi pada masa-masa tahun politik. Meningkatnya korupsi pemerintah, semakin mempersulit tantangan untuk terus meningkatkan PDB per kapita di negara-negara berkembang.

Korupsi memiliki pengaruh yang jauh lebih buruk terhadap pertumbuhan di negara-negara dengan siklus pemilu yang 'tinggi' (tahun pemilu ditambah periodekampanye). Namun, dampaknya kurang terasa dan berkurang secara signifikan di negara-negara dengan siklus politik yang 'rendah'. Adapun temuan bahwa korupsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara instan

adalah signifikan. Namun, hal itu harus diwaspadai dengan saksama karena manfaat ini berumur pendek dan baru terlihat jelas setelah pertumbuhan mencapai keseimbangan jangka panjang, yang mengungkap hasil buruk yang sebenarnya. Dalam konteks negara berkembang yang menyelenggarakan pemilu, di mana terdapat peningkatan korupsi pada masa-masa kampanye, hal ini menjadi sangat mungkin – mengapa dalam jangka pendek PDB per kapita bisa meningkat karena adanya korupsi, namun terdampak merugi dalam jangka panjang. Karena peningkatan PDB per kapita dalam jangka pendek ini hanya merupakan strategi manipulatif sesaat yang didasari motif politik dan tidak bersifat permanen, sehingga tidak mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Menyelenggarakan pemilihan umum, dan dengan demikian memiliki ‘tahun politik’, merupakan jalan bagi suatu negara berkembang yang menyatakan dirinya demokratis, yaitu mengakui kedaulatan berada di tangan rakyat untuk dapat mengubah nasib negaranya menjadi lebih maju. Hal ini sesuai sasaran Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menjamin terwujudnya masyarakat inklusif akan hak atas pembangunan. Namun, tahun politik dapat juga menjadi bumerang ketika para pejabat negara yang merupakan pertahana, atau para politisi bermaksud memanipulasi keadaan ekonomi dalam jangka pendek (dengan perilaku-perilaku/transaksi-transaksi di bawah tangan) hingga akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Negara berkembang memang dalam tahap transformasi birokrasi pasca kemerdekaan, masih dalam keadaan politik yang tidak stabil dan kesulitan dana di semua sektor, sehingga fenomena korupsi ini sulit untuk dapat dihindarkan atau diperparah dengan adanya ajang pemilihan umum.

Dampak utang pemerintah bertentangan dengan ekspektasi dan menunjukkan bahwa alih-alih menghambat pertumbuhan ekonomi, hal itu justru dapat merangsangnya dalam jangka panjang, meskipun dapat menyebabkan penurunan sementara dalam PDB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah negara-negara berkembang untuk mengambil utang publik adalah tepat dalam rangka menutup defisit anggaran yang tidak dapat dibiayai oleh sumber atau cara lainnya. Selain itu, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk membiayai pembangunan berkelanjutan karena pihak swasta memiliki keterbatasan kapasitas untuk berkontribusi (Mankiw, 2007). Investasi memiliki peran paling penting mendorong pertumbuhan, karena fluktuasinya pun masih berdampak positif, sekalipun di suatu negara yang korup dan memiliki utang publik. Sesuai dengan pernyataan Barro (1991) “Investasi merupakan faktor penting untuk pertumbuhan”. Pertumbuhan populasi penduduk berdampak positif dalam jangka panjang – mendukung pandangan optimis, namun tidak berdampak dalam jangka pendek. Kemudian keterbukaan perdagangan tidak berdampak signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, dapat diartikan bahwa keterbukaan perdagangan bukan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Barro (1991) – bahwa dalam jangka panjang, keterbukaan perdagangan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui efek limpahan.

Tingkat korupsi saat ini umumnya dinyatakan sebagai skor persepsi oleh beberapa lembaga independen, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase terhadap PDB. Menjadikan dampak korupsi ini sulit terobservasi seutuhnya. Permasalahan korupsi pun merupakan masalah persepsi subjektif (Fazekas dan Hellmann, 2023) yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, norma atau kebiasaan di tiap negara yang tentunya berbeda-beda. Pejabat publik dan politisi di negara berkembang yang mengalami keterbatasan dana, melakukan tindakan korupsi karena berbagai alasan, tidak menutup kemungkinan karena keterpaksaan bukan keinginan. Menganggap korupsi adalah hal biasa memang tidak dapat dibenarkan, karena nyatanya perilaku korupsi ini merugikan pembangunan negara secara berkelanjutan. Perbaikan pengendalian korupsi di suatu institusi (sebagai tindakan represif) terbukti dapat menurunkan praktik korupsi (Ekananda, 2018), namun tindakan preventif pun perlu dilakukan dimulai dari penyelarasan persepsi menyeluruh pada pejabat publik (yang sering juga merupakan seorang politisi) bahwa praktik-praktik di bawah tangan atau di balik bayangan ini sebenarnya merugikan bersama termasuk dirinya sebagai ‘entitas’ (bagian) dari suatu negara secara keseluruhan (Srihadiastuti dan Ekananda, 2024). Korupsi mungkin optimal dari sudut pandang individu, namun tidak optimal dari segi pembangunan ekonomi (Hall dan Jones, 1999).

Sejauh ini berdasarkan temuan, kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang untuk mengambil utang publik adalah tepat, guna membiayai defisit anggaran. Meskipun demikian, ancaman tetap ada ketika mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik karena sudah banyak contoh negara-negara berkembang yang dinyatakan bangkrut karena tidak dapat membayar dan melunasi utang: Sri Lanka (2023), Venezuela (2017), Ekuador (2014), Argentina (2014), dan Zimbabwe (2008). Adapun poin-poin rekomendasi kebijakan yang kami sarankan adalah: (1) Memperbaiki sistem pemerintahan untuk dapat meminimalisir tindak korupsi, tanpa mengesampingkan sebab apa korupsi terjadi. Karena korupsi bisa saja terjadi karena keterpaksaan ketika hak-hak mendasar tidak terpenuhi; (2) Membentuk indikator baru yang lebih konkrit untuk mengukur tingkat korupsi dalam bentuk nominal atau persentase dari PDB; (3) Membentuk mekanisme pembayaran pajak langsung yang sangat transparan, sebagai bentuk kontrol publik, di mana wajib pajak dapat menentukan sektor mana yang perlu dibiayai. Sehingga fungsi parlemen tidak akan begitu kuat dalam penentuan alokasi anggaran negara, dan fungsi lembaga eksekutif akan lebih profesional dalam mengelolanya; serta (4) Negara sepenuhnya memfasilitasi ajang kampanye tiap kandidat, sehingga para kandidat tidak perlu mengeluarkan dana pribadi yang jumlahnya tidak masuk akal untuk melakukan mobilisasi ke wilayah-wilayah politik dan 'membeli suara'.

Rekomendasi ini kami sarankan atas dasar tidak adanya kemutlakan bagi suatu negara untuk menggunakan satu sistem selamanya tanpa penyesuaian dengan berbagai isu dan kebutuhan yang berkembang di tiap era. Atas dasar apa suatu negara harus menggunakan suatu sistem dengan mutlak, tidak ada justifikasi akan hal tersebut. Karena pada umumnya negara berkembang adalah negara yang berdiri setelah terjajah dan membangun negaranya dengan campuran cara-cara kolonial yang tersisa. Sementara mungkin cara-cara tersebut sangat tidak sesuai dengan adat, norma, dan kebudayaan asli pada bangsanya.

### Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diah Widyawati, S.E., M.Sc., PhD, dan Ibu Dr. Beta Yulianita G. Laksono, S.E., M.E., atas masukan dan arahan yang membangun untuk penelitian ini.

### Referensi

- Al Qudah, A., Zouaoui, A., & Aboelsoud, M. E. (2020). Does corruption adversely affect economic growth in Tunisia? ARDL approach. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 38–54. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2018-0076>
- Alfada, A. (2019). Corruption and Economic Growth in ASEAN Member Countries. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(2), 111. <https://doi.org/10.47291/efi.v65i2.628>
- Amick, J., Bukovansky, M., & Liu, A. H. (2022). Presidential Electoral Cycles and Corruption Charges. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 281–307. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.9>
- Andvig, J. C., Fjeldstad, O. H., Amundsen, I., Sissener, T., & Søreide, T. (2001). Corruption: A review of contemporary research. In *Report - Chr. Michelsen Institute* (Issue 7).
- Antoni, Masri, R., Ahmad, A. M. Bin, Muslim, I., Nasfi, Sabri, & Rahmad. (2019). The relationship between the level of corruption and economic growth in indonesia: An investigation using supply chain strategy and bounds test. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(6), 694–704.
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries Author ( s ): Robert J . Barro All use subject to JSTOR Terms and Conditions ECONOMIC GROWTH IN A CROSS SECTION OF COUNTRIES \*. In *The Quarterly Journal of Economics* (Vol. 106, Issue 2).
- Beyaert, A., García-Solanes, J., & Lopez-Gomez, L. (2023). Corruption, quality of institutions and growth. *Applied Economic Analysis*, 31(91), 55–72. <https://doi.org/10.1108/AEA-11-2021-0297>
- Binkley, J. K., Young, J., & Young, J. (2020). *Murray State 's Digital Commons The Chow Test with*

*Time Series-Cross Section Data.*

- Ekananda, M. (2018). Misinvoicing analysis in ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). *European Research Studies Journal*, 21(1), 187–205. <https://doi.org/10.35808/ersj/941>
- Erum, N., & Hussain, S. (2019). Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries. *Resources Policy*, 63(June), 101429. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101429>
- Fazekas, M., & Hellmann, O. (2023). Elections and Corruption: Incentives to Steal or Incentives to Invest? *Studies in Comparative International Development*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12116-023-09412-0>
- Finan, F., & Mazzocco, M. (2021). Electoral incentives and the allocation of public funds. *Journal of the European Economic Association*, 19(5), 2467–2512. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa055>
- Gründler, K., & Potrafke, N. (2019). Corruption and economic growth: New empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 60(July), 101810. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.08.001>
- Hall, R. E., & Jones, C. I. (1999). Why do Some Countries Produce so Much More. *Quarterly Journal of Economics*, February, 83–116.
- Huang, C. J. (2016). Is corruption bad for economic growth? Evidence from Asia-Pacific countries. *North American Journal of Economics and Finance*, 35(100), 247–256. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2015.10.013>
- Huntington, S. P., & Fukuyama, F. (1968). Political order in changing societies. In *Political Order in Changing Societies*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1970-2-257>
- Ibrahim, C. (2021). Corruption, public debt and economic growth – evidence from developing countries. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 24–37. <https://doi.org/10.1108/IJDI-12-2019-0208>
- IMF. (2018). *Sovereign Debt*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Topics/sovereign-debt>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Khan, J., Adeel-Farooq, R. M., Akram, K., & Abbasi, M. S. (2020). Is Corruption Detrimental for Economic Growth? A Panel Data Analysis of Selected South Asian Economies. *South Asian Studies (1026-678X)*, 35(1), 37–46. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=143885721&site=ehost-live>
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi* (Edisi Ke-6). Erlangga.
- Mironov, M., & Zhuravskaya, E. (2016). Corruption in procurement and the political cycle in tunneling: Evidence from financial transactions data. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(2), 287–321. <https://doi.org/10.1257/pol.20140188>
- Musa, K., Sohag, K., Said, J., Ghapar, F., & Ali, N. (2023). Public Debt, Governance, and Growth in Developing Countries: An Application of Quantile via Moments. *Mathematics*, 11(3), 1–13. <https://doi.org/10.3390/math11030650>
- Olamide, E. G., & Maredza, A. (2023). Pre-COVID-19 evaluation of external debt, corruption and economic growth in South Africa. *Review of Economics and Political Science*, 8(1), 19–36. <https://doi.org/10.1108/REPS-03-2021-0019>
- Potrafke, N. (2019). Electoral cycles in perceived corruption: International empirical evidence. *Journal of Comparative Economics*, 47(1), 215–224. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2018.11.003>
- Rahman, N. H. A., Ismail, S., & Ridzuan, A. R. (2019). How does public debt affect economic growth? A systematic review. *Cogent Business and Management*, 6(1).

<https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1701339>

- Sinaga, S. T., Ekananda, M., Gitaharie, B. Y., & Setyowati, M. (2023). Tax Buoyancy in Indonesia: An Evaluation of Tax Structure and Policy Reforms. *Economies*, 11(12), 1–18. <https://doi.org/10.3390/economies11120294>
- Srihadiastuti, R., & Ekananda, M. (2024). *Public Debt Burden and Corruption in Developing Countries*. 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v5i1.1981>
- TI. (2020). *WHAT IS CORRUPTION?* Transparency International. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Time Magazine. (2024). The Ultimate Election Year: All the Elections Around the World in 2024. <https://time.com/6550920/world-elections-2024/>
- Trabelsi, M. A., & Trabelsi, H. (2021). At what level of corruption does economic growth decrease? *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1317–1324. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2019-0171>
- Umam, A. K. (2024). *Integritas: Jurnal Antikorupsi Bayang-bayang korupsi politik di tengah tren kemunduran demokrasi di Indonesia : Pelajaran dari dinamika Pemilu Presiden 2024*. 10(1), 1–16.
- UN. (2018). *The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals An opportunity for Latin America and the Caribbean Thank you for your interest in this ECLAC publication*. [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40156/25/S1801140\\_en.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40156/25/S1801140_en.pdf)
- UNDESA. (2023). Global Sustainable Development Goals Report 2023: Times of crisis, times of change: Science for accelerating transformations to sustainable Development. *United Nations, New York*, =. [https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL\\_GSDR\\_2023-Digital-110923\\_1.pdf%0Ahttps://unstats.un.org/sdgs/report/2023/](https://sdgs.un.org/sites/default/files/2023-09/FINAL_GSDR_2023-Digital-110923_1.pdf%0Ahttps://unstats.un.org/sdgs/report/2023/)
- Yanto, D., & Adrison, V. (2020). Do the Government Expenditure Audits Correlates With Corruption in the Public Procurement? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 19-33. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i1.378>
- Yusuf, A., & Mohd, S. (2021). The impact of government debt on economic growth in Nigeria. *Cogent Economics & Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1946249>